

EFEKTIFITAS PROGRAM PRAKERJA DALAM MEWUJUDKAN KESEMPATAN KERJA DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Irsyad Dhahri¹, Nurharsya Khaer Hanafie², Muhammad Iqbal³

Fakultas Ilmu sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹irsyad.dhahri@unm.ac.id, ²nurharsya.khaer@unm.ac.id

³mi8600042@gmail.com

Abstrack: *This study aims to determine (1) the legal basis of the pre-employment program (2) to determine the effectiveness of the pre-employment program in Polewali District, Polewali Mandar Regency. This research is a qualitative descriptive study. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the study were collected and processed by qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that: (1) The legal aspects of the Pre-Employment Card program are regulated in Presidential Regulation No. 76 of 2020 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 36 of 2020 concerning Development of Work Competencies through the Employment Card Program and Law No. 13 of 2003 concerning Employment (2). The effectiveness of the pre-employment program card in terms of its implementation has not been effective due to the lack of mastery of technology in registering most of the participants of the pre-employment program are parents. Supervision of the pre-employment program is still not clear at the district level who is responsible for carrying out the supervision due to the lack of coordination between the central and regional parties in coordinating the recipients of the pre-employment program.*

Keywords: *Effectiveness, Pre-Employment, Employment*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui (1) Dasar Hukum Program Prakerja (2) Untuk mengetahui Epektifitas Program Prakerja di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan diolah dengan analisis data secara Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aspek legalitas program Kartu Prakerja diatur dalam Perpres Nomor Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Parakerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2). Efektivitas kartu program prakerja dalam hal pelaksanaannya belum efektif disebabkan kurangnya penguasaan teknologi dalam melakukan pendaftaran yang sebagian besar peserta program prakerja orang tua. Pengawasan terhadap program prakerja masih belum jelas di tingkat kabupaten siapa yang menjadi penanggung jawab untuk melakukan pengawasan disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak pusat dengan daerah dalam melakukan koordinasi terhadap penerima program prakerja

Kata Kunci: *Efektifitas, Prakerja, Ketenagakerjaan*

PENDAHULUAN

Mewujudkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing bagi angkatan kerja maka

diperlukan memberikan pengembangan kompetensi kerja yang diwujudkan dalam pelaksanaan Program Prakerja. Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa

dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan Badan pusat statistik (2021), Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari 2021 yakni sebesar 6,26 persen.

Berbagai strategi untuk mengatasi pengangguran dikeluarkan sebagai senjata dalam mengatasi pengangguran. Salah satu program yang dikeluarkan adalah program Kartu Prakerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Kartu tersebut dipromosikan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah. Sebagai contoh, dalam sebuah kampanye Pemilu 2019 lalu di Senayan, 10 Maret 2019, ia akan menjalankan program ini jika ia terpilih sebagai presiden sebagai jalan bagi para pendaftarannya untuk memasuki dunia kerja.

Pihak pemerintah melalui situs prakerja.go.id menyampaikan bahwa

proses belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia (long-life education). Sebab, tujuan Kartu Prakerja ini ingin mengurangi angka pengangguran maupun mencegah pengangguran. Penerima Kartu Pra Kerja akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan menyatakan bahwasanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu pemberhentian tenaga kerja dalam beberapa hal yang memiliki akibat terhadap suatu hak dan kewajiban yang telah berakhir yang dimiliki para pekerja. pada awalnya, Hal ini terjadi bisa dikarenakan perusahaan mengalami kebangkrutan, pengurangan tenaga kerja, habis kontrak, dan lain sebagainya. Meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini membuat Indonesia mengalami peningkatan pengangguran, dengan adanya program Kartu Pra Kerja maka diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terjadi akibat PHK dan dapat melatih soft skill serta hardskill bagi peserta yang memiliki Kartu Pra Kerja.

Adanya program kartu prakerja ini adalah sebagai wadah pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan dan juga untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kartu prakerja juga di anggap tepat oleh sebagian besar masyarakat.

Keberadaan kartu prakerja pada masa pandemic virus korona ini sudah tepat (42,5 persen yakin, 27 persen sangat yakin). Sebab masyarakat mulai sadar bahwa peningkatan skill dan keterampilan tenaga kerja untuk menyongsong lapangan kerja baru yang mungkin tercipta pada masa pasca pandemi sangat penting. Pelatihan-pelatihan skill yang paling diminati responden adalah pelatihan yang menunjang kemandirian agar bisa membuka usaha sendiri.

Namun program prakerja ini terbilang tidak efektif disebabkan salah satunya penyalahgunaan insentif dana yang diberikan. Dalam survey kartu pra-

kerja yang dilaksanakan oleh manajemen pelaksana program (PMO) kartu prakerja menunjukkan, uang intensif rata-rata digunakan peserta untuk mencukupi kebutuhan sehari. Insentif dana yang diberikan semestinya dipergunakan untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan didalam program prakerja. Namun, dana yang di dapatkan dari program prakerja tersebut tidak banyak yang menyalahgunakan dengan tidak membuka peluang pekerjaan sesuai dengan tujuan di bentuknya program prakerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu strategi untuk menganalisis secara detail suatu permasalahan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan pertimbangan bahwa cukup banyak masyarakat yang ikut dalam Program Kartu Prakerja di daerah tersebut. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Ibservasi, Wawancara dan dokumentasi, serta pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Peserta Program Kartu Prakerja di Kecamatan Polewali

Program Prakerja diperuntukkan khususnya kepada masyarakat pencari kerja, yang tidak memiliki pekerjaan, yang dirumahkan karena PHK, termasuk pelaku usaha kecil dan mikro serta pekerja ataupun buruh yang perlu ditingkatkan keterampilan kerjanya.

Tabel 1: Peserta Program Kartu Prakerja

Nama	Umur	Alamat
Sutriani	36	Jln. Bangau
Halija	52	Jln. Durian
Aziz	53	Jln. Durian
Dira	45	Jln. Durian
Tahera	42	Jln. Durian
Abdullah	41	Jln. Durian
Sherlina	35	Jln. Durian
Arif	41	Jln. Durian
Syamsul	48	Jln. Langsung
Piah	45	Jln. Langsung
Bayu	40	Jln. Durian
Suprianto	25	Jln. Langsung
Sapri	24	Jln. Langsung
Fitri	22	Jln. Andi depu
Harnani	40	Jln. Kemakmuran
Yulianti	43	Jln. Kemakmuran
Meliana	37	Jln. Lantora
Rahma	24	Jln. Pantai bahari
Irfan	24	Jln. Manga
Ramliah	22	Alli-alli
Nurjannah	42	Jaln. Manga
Sri wati	27	Jln. Manga
Jupri	32	Terminal
Yusmiati	30	Takatidung
Yusman	22	Takatidung
Nurshan	24	Takatidung
Ramadhani	24	Takatidung
Haris	25	Lantora
Ilham hamsah	21	Btn marwah
Ikhsan khalik	29	Jln. Bangau
Aco irman	26	Jln. Bangau
Ismail	25	Jln. Bangau
Maswandi	32	Saruran
Kartini abbas	46	Btn koppe
Tarmizi	28	Btn koppe
Mufarrizatu n	24	Btn koppe
Adelia ayu S.	20	Jln. Kemakmuran
Mardianah	21	Jln. Kemakmuran
Nurmayanti	40	Jln. A. yani

Mitasiani	23	Jln.Kemakmuran
Pinta sarin	21	Manding
Nurhusni	27	Polewali
Hamka	22	Jln.Cumi-cumi
Fadli	23	Polewali
Ismail	22	Polewali
Muh yusri	24	Polewali
Abiding	35	Polewali
Adnan	25	Manding
Idris	56	Manding

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Polewali Mandar Maret 2022

B.Aspek Legalitas Program Prakerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Efektivitas program prakerja merupakan suatu opsi dalam mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan kerja kepada para pencari kerja sehingga program ini menjadi wadah dalam meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari hasil penelitian berdasarkan dari ketentuan perpres nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan program prakerja. Namun secara teknis Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM sebagai badan pelaksana di tingkat kabupaten tidak mengetahui adanya program prakerja dikarenakan tidak adanya pemberitahuan sebelumnya sebelum terbitnya perpres nomor 36 tahun 2020. Sehingga Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM tidak memiliki kesiapan dalam mengatasi dan mengawasi program tersebut. Dinas Transmigrasi, tenaga Kerja dan ESDM hanya menerima program ini mengenai penerimaan peserta program kartu prakerja. Khususnya seksi bidang ketenagakerjaan hanya menerima amanah atas program kartu prakerja. Namun diketahui bahwa Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM hanya menjalankan

ketentuan perpres nomor 76 tahun 2020 serta melakukan pengawasan kepada calon penerima kartu prakerja. Namun ternyata Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM tidak pernah melakukan observasi secara langsung , tetapi mereka mengetahui beberapa yang terdaftar program prakerja tersebut.

Program ini merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan secara online yang dimana para pendaftar calon pekerja yang mengikuti tahap-tahap yang telah ditentukan namun sebagian pendaftar memiliki kendala dalam melakukan pendaftaran yakni kurangnya penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pendaftaran seperti gagap teknologi yang seperti ibu-ibu yang jarang melakukan kegiatan dengan teknologi berupa hp/ laptop. Kemudian pihak Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM mengalami kesulitan untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi pendaftar program prakerja dikarenakan pelaksanaannya dilakukan secara online.

C. Efektivitas Program Prakerja

Berdasarkan perpres pasal 2 nomor 76 tahun 2020 menyatakan bahwa tujuan kartu prakerja yaitu untuk meningkatkan kompetensi para angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dan mengembangkan kewirausahaan . namun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor teknis dalam pelaksanaan program prakerja kurang begitu efektif disebabkan karena kurangnya penguasaan teknologi oleh para penerima kartu program pra kerja berdasarkan data penerima program pra kerja sebagian besar yang berumur 30 tahun ke atas yang notabene sudah berkeluarga sehingga menimbulkan bantuan oleh orang lain atau sanak keluarga untuk dilakukan bimbingan dalam proses pelaksanaan pendaftaran. Adapun faktor pengawasan pada lokasi

penelitian yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM sebagai badan pengawas yang diberikan oleh kementerian keuangan sebagai pengawas di tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata Dinas Transmigrasi, tenaga Kerja dan ESDM melakukan pengawasan dengan bentuk pendataan siapa-siapa penerima program pra kerja. Ini merupakan suatu tanggung jawab berdasarkan ketentuan perpres nomor 76 tahun 2020 dengan ketentuan yang diamanahkan dalam perpres tersebut sesuai dengan pasal 19 mengenai manajemen pelaksanaan untuk kelan-caran operasional program kartu prakerja, pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan program pra kerja, kemitraan dan ekosistem program pra kerja, komunikasi dan penyidikan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kerja kelola yang baik dalam pelaksanaan program kartu prakerja, dan pemantauan dan evaluasi kartu prakerja. Hal ini menjadi wewenang di tingkat pemerintah daerah dibebankan kepada dinas Transmigrasi, tenaga Kerja dan ESDM dikarenakan secara struktur program ini di tingkat pusat merupakan wewenang komite yang terdiri dari yaitu menteri koordinator bidang perekonomian di tingkat pusat dan pada tingkat provinsi dan kabupaten dilimpahkan kepada pemerintah yaitu kepada dinas Transmigrasi, tenaga Kerja dan ESDM untuk melakukan pengawasan. Perlu diketahui program ini merupakan program yang diterbitkan pada masa korona sehingga dalam perpres ada ketentuan yang mengatur dalam segi pengawasan. Dalam pengawasannya untuk insentif dana yang diberikan kepada para penerima.

Adapun hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat umum yang mengetahui program pra kerja sehingga ada ketentuan-ketentuan dalam pendaftaran program pra kerja yang dimana aparat sipil Negara tidak dapat melakukan pendaftaran dalam program ini. Namun diketahui banyak juga minat dari

aparat sipil Negara untuk melakukan pendaftaran sebagai usaha sampingan mereka.

Dalam mengurangi tingkat pengangguran khususnya di kecamatan polewali ada beberapa faktor seperti penerima menggunakan dana tersebut sesuai dengan anjuran dari pemerintah berdasarkan perpres nomor 76 tahun 2022 program kartu pra kerja bertujuan mengembangkan kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dan mengembangkan kewirausahaan namun jika dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah maka dalam hal mengurangi pengangguran akan sulit dalam pengurangan angka pengangguran. Sehingga efektifitas program prakerja efektif jika para penerima mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi tujuan program prakerja ini di bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Sastrohadiwiryono, S., & Syuhada, A. H. (2021). *Manajemen tenaga kerja Indonesia*. Bumi aksara.
- Ishak, K. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Implikasinya Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia*.
- Nita, P. C. Q. 2020. *Analisis Kebijakan Kartu Pra Kerja Terhadap Pekerja yang di PHK Untuk Menanggulangi Pengangguran di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Rafitrandi, D. 2020. *Program Kartu Prakerja: Tantangan Implementasi di Masa Pandemi COVID-19 dan Sesudahnya*. CSIS Commentaries ECON-001-ID.
- Tambunan, 2002. *Tenaga Kerja*. Yogyakarta: BPFE.

- Bisnis News. 2021. Februari 2021, Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Capai 139,81 Juta Orang. Diakses pada 23 Januari 2021 dari Badan Pusat Statistik. 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka. Dapat diakses pada Diakses pada 20 Januari 2021 Wita.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2015. Dapat Diakses Di: Diakses Pada 23 Januari 2021
- Helmi, A. F. (1996). Disiplin kerja. Buletin Psikologi, 4(2), 32-42
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Jurnal Perspektif, 18(2), 201-208
- Kliklegal.com. 2020. Menelisik Aspek Hukum Penunjukan Platform Digital Pelaksana Program Kartu Prakerja di Tengah Kritik dan Polemik. Diakses pada 8 April 2022 dari Moch, H.A. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya. Volume 3. No, 3. Universitas Negeri Surabaya
- Lubis, R. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Balai Latihan Kerja
- Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Murni, Asfia. 2009. Ekonomika makro. PT. Refika Aditama: Bandung
- Ningsih, W., & Abdullah, F. (2021). Analisis Perbedaan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kota Malang. Journal of Regional Economics Indonesia, 2(1), 42-56
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. Journal of Government and Political Studies, 3(2)
- Pramesthi, R. N. (2013). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten trenggalek. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3).
- Purwaningseh, W. (2010). Analisis Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, dan Golongan Pokok Jabatan di Kabupaten Kudus.
- Payaman, J. Simanjuntak. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit FE UI: Jakarta
- Pramesthi, Rovia Nugrahani. 2013. Pengaruh
- Rustiono, Deddy. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tesis
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Institut Bogor
- Siti handayani, Budi Hartono 2020. Perspektif: Jurnal Ekonomi &

- Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol. 18 no. 2
- Sholeh, M. (2007). Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah: Teori serta beberapa potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1).
- Sukirno, Sadono. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Yawie, Y and Palupi, L. P. 2020. *Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.Vol. 5. No.2